

**ASAS KESEIMBANGAN**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA**  
**ANTARA PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN DI**  
**UD. SURYA ABADI FURNITURE SUKOHARJO**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**MONICA SELLY AGATHA PUTRI**  
**C100150070**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ASAS KESEIMBANGAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA  
PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN DI UD. SURYA ABADI  
FURNITURE SUKOHARJO**

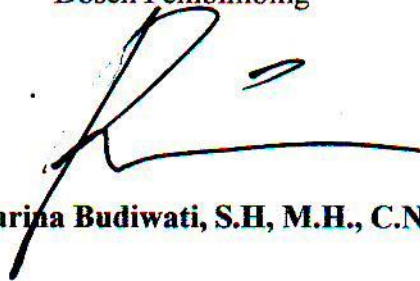
**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**MONICA SELLY AGATHA PUTRI**  
**C100150070**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.

**(Septarina Budiwati, S.H, M.H., C.N.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ASAS KESEIMBANGAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA  
PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN DI UD. SURYA ABADI  
FURNITURE SUKOHARJO**

Oleh:

**MONICA SELLY AGATHA PUTRI**  
**C100150070**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

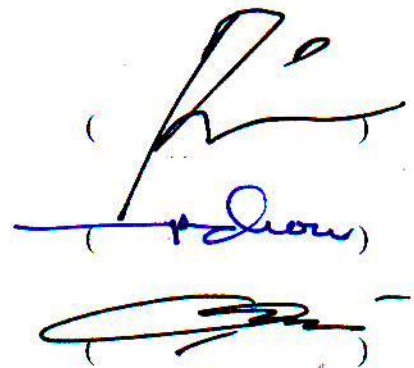
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari ..Sabtu.. 19 Januari 2019.....

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, SH. MH  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Shallman Al Farizi SE, SH, MM, Mkn  
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



  
**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 537 / NIDN.0727085803**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Januari 2019

Penulis



Monica Selly Agatha Putri  
C100150070

**ASAS KESEIMBANGAN  
TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA  
PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN DI UD. SURYA ABADI  
FURNITURE SUKOHARJO**

**Abstrak**

Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu Pengusaha sebagai pemberi kerja dan Karyawan sebagai penerima kerja. Perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan dibuat sebagai dasar lahirnya suatu hubungan kerja. Dalam suatu perjanjian kerja, karyawan mengadakan perjanjian kerja secara tertulis dengan perusahaan dengan mengikatkan dirinya. Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja dilihat dari bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban di dalam perjanjian kerja di UD. Surya Abadi Furniture. Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah Penelitian Deskriptif dengan Pendekatan Yuridis Normatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja di UD. Surya Abadi Furniture masih belum sepenuhnya diterapkan. Dilihat dari segi tanggungjawab hukum para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban sudah adil dan seimbang, namun terdapat klausul yang belum dituliskan dalam perjanjian kerja tersebut yaitu mengenai ketentuan sanksi administratif apabila Pengusaha melanggar hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja.

**Kata Kunci:** perjanjian kerja, asas keseimbangan, tanggung jawab hukum

**Abstract**

The making of employment agreement is based on the agreement between two sides; they are the employer who gives the job and the employee who gets the job instead. The employment agreement between the company and its employees is made as the basis of work relationship. In a certain employment agreement, the employees are bound to the company. This thesis deals with the application of the balanced principle in the employment agreement seen from how the legal responsibility of the parties in carrying out their rights and obligations in the employment agreement in UD. Surya Abadi Furniture. The research method used by the writer is descriptive method with normative juridical approach. The research result done by the writer in this thesis can be concluded that the application of the balanced principle in the employment agreement seen from how the legal responsibility of the parties in carrying out their rights and obligations in the employment agreement in UD. Surya Abadi Furniture. still not fully implemented. In terms of legal responsibility, the right and responsibility have been done in balance, however, there is an unstated provision of work agreement, that is administrative sanction if the employer breaks the things that were agreed in the employment agreement.

**Keywords:** employment agreement, principle of balance, legal responsibility

## 1. PENDAHULUAN

Di era Industrialisasi saat ini, didalam bidang ketenagakerjaan sangat banyak dibutuhkan tenaga kerja. Perusahaan tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya tenaga kerja. Demi membantu mendorong kemajuan perekonomian suatu negara perlu adanya kerjasama antara perusahaan dan tenaga kerja dalam perindustrian saat ini. Perusahaan adalah mereka yang melakukan sesuatu untuk mencari keuntungan dengan menggunakan banyak modal, tenaga kerja, yang dilakukan secara terus menerus dan terang-terangan untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Tenaga Kerja menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: *“setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang atau dalam akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”*.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah:

*“perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”* Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut dengan perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk memastikan kesejahteraan antara tenaga kerja dengan pemberi kerja dalam melaksanakan hubungan kerja oleh karena itu, perlu dibuat suatu Perjanjian Kerja yang akan menjadi landasan antara pemberi kerja dan tenaga kerja dalam melaksanakan hubungan kerja. Pengertian perjanjian kerja menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah:

*“ perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. ”*

Bahwa di era globalisasi saat ini, industrialisasi dan hukum yang berbasis nilai-nilai keislaman, lebih diperhatikan agar posisi antara Perusahaan dan tenaga kerja dalam keadaan seimbang sehingga aspek keadilan dapat tercapai. Pelaksanakan *Al-Adalah* (Keadilan) dalam suatu perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajiban. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan

seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam QS. Al-Hadid (57):25 disebutkan bahwa Allah SWT berfirman yang artinya: *“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”*.

Dari surat di atas, bahwa tujuan keseimbangan dalam aspek keislaman adalah agar keadilan dapat ditegakkan, terutama keadilan antara perusahaan dan karyawan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Asas keseimbangan sangat penting diterapkan dalam isi suatu perjanjian kerja antara perusahaan dan tenaga kerja, karena asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengangkat dua permasalahan guna dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Bentuk dan isi dari perjanjian kerja antara Perusahaan dan karyawan di UD. Surya Abadi Furniture Sukoharjo?; (2) Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan di UD. Surya Abadi Furniture Sukoharjo?; dan (3) Bagaimana Penerapan Asas Keseimbangan dalam perjanjian kerja antara Perusahaan dan karyawan di UD. Surya Abadi Furniture Sukoharjo?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui bentuk dan isi dari perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan di UD. Surya Abadi Furniture Sukoharjo, Untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan di UD. Surya Abadi Sukoharjo dan Untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan pada perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan di UD. Surya Abadi Furniture Sukoharjo. Serta untuk menambah pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum perdata mengenai tanggung jawab hukum para pihak dalam suatu perjanjian kerja dan penerapan asas keseimbangan dalam suatu perjanjian terutama dalam Perjanjian Ketenagakerjaan. Selain tujuan penelitian yang telah diungkapkan di atas, manfaat yang diharapkan dari penelitian

ini diantaranya adalah Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya hukum perdata tentang Tanggung Jawab Hukum Para pihak dalam perjanjian kerja dan Penerapan asas keseimbangan pada perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan, serta manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah mampu memberikan masukan pada institusi atau perusahaan yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan kemajuan perusahaan serta kesejahteraan karyawan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

## **2. METODE**

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini mengungkap tentang Penerapan asas keseimbangan dilihat dari bagaimana Tanggung Jawab Hukum para pihak dalam Perjanjian kerja antara perusahaan dengan Karyawan di UD. Surya Abadi Furniture . Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis Data terdiri dari data primer dan sekunder berupa data perjanjian kerja. Metode analisis data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan data normative kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Bentuk dan isi dari Perjanjian kerja di UD. Surya Abadi Furniture**

Perjanjian Kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan pengertian perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 UU No 13 Tahun 2003, yaitu perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha /pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Jadi dapat dilihat bahwa perjanjian kerja di UD. Surya Abadi Furniture telah memuat syarat-syarat kerja dan hak dan kewajiban para pihak yang telah dicantumkan dalam Pasal 2 perjanjian kerja tersebut.

Bentuk dari perjanjian kerja di UD. Surya Abadi furniture telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) yaitu bahwa bentuk perjanjian kerja di UD. Surya Abadi Furniture telah dibuat dalam bentuk tertulis. Mengenai isi perjanjian kerja di dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No 13 tahun 2003 ditegaskan bahwa perjanjian



kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan batal demi hukum. Ancaman batal seperti ini semata-mata juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja, yaitu agar isi perjanjian kerja tidak menjadikan tenaga kerja sebagai objek eksploitasi pengusaha. Bentuk dan isi perjanjian kerja di UD. Surya Abadi furniture telah dibuat sesuai dengan syarat sahnya perjanjian kerja Pasal 52 ayat (1) yaitu: (1) Kesepakatan kedua belah pihak; (2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; (3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan (4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ,ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan obyek dari Perjanjian Kerja adalah suatu hal telah diperjanjian yaitu berupa pekerjaan. Objek perjanjian haruslah yang halal yakni tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Subjek hukum dari perjanjian kerja tersebut yaitu para pihak di dalam perjanjian kerja yaitu Buruh dan pengusaha di UD. Surya Abadi Furniture dimana para pihak diletakkan hak dan kewajiban. Akibat dari perjanjian kerja yang telah dibuat maka perjanjian tersebut dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya setelah ditandatanganinya perjanjian kerja tersebut, serta perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila sudah disepakati kedua belah pihak.

### **3.2 Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerja antara Perusahaan dengan Karyawan di UD. Surya Abadi Furniture**

Dalam suatu perjanjian umum, kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), begitu pula dalam suatu perjanjian kerja, dimana Perusahaan dengan Karyawan saling sepakat dalam melaksanakan suatu perjanjian sehingga melahirkan hubungan kerja, dimana Kedua belah pihak akan dibebani suatu hak dan kewajiban. Suatu perjanjian kerja yang telah terjadi menimbulkan suatu tanggungjawab bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja tersebut, demikian juga yang terjadi dalam suatu perjanjian kerja antara UD. Surya Abadi Furniture dengan Karyawan.

Dari penjabaran mengenai hak dan kewajiban Pihak I (Pemberi Kerja) yaitu sebagai pemberi kerja dalam perjanjian kerja di UD. Surya Abadi Furniture dapat dianalisis bahwa pelaksanaan kewajiban oleh pihak UD. Surya Abadi furniture merupakan suatu tanggung jawab harus dilaksanakan oleh pihak pengusaha, agar pihak UD. Surya Abadi Furniture dapat mendapatkan haknya dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pihak ke II (Penerima Kerja). Dan di dalam Perjanjian Kerja tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban oleh UD. Surya Abadi Furniture selaku pemberi kerja sudah dicantumkan di dalam perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 54 ayat (1) huruf f.

Secara garis besar dalam perjanjian kerja ini mengandung arti bahwa setelah penerima kerja diterima di perusahaan tersebut, maka Penerima kerja harus bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang telah diperjanjikan sampai berakhirnya suatu perjanjian kerja. Berdasarkan hak dan kewajiban Pihak ke II yaitu penerima kerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja antara Pengusaha dengan Karyawan di UD. Surya Abadi Furniture, dapat dianalisis bahwa pihak ke II memiliki tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah dicantumkan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f, bahwa suatu perjanjian kerja dibuat tertulis harus memuat syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan buruh. Apabila para pihak tidak melaksanakan tanggung jawabnya maka dapat dibebani dengan sanksi maupun ganti rugi yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Dalam perjanjian kerja di UD. Surya Abadi Furniture mengenai hak dan kewajiban yang dibuat secara tertulis diperjanjian kerja telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf F UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dalam perjanjian kerja antara UD. Surya Abadi Furniture dengan Karyawan terdapat klausul-klausul yang mengatur mengenai tanggungjawab hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, guna memberikan dasar yang jelas bagi kedua belah pihak menyangkut tanggung jawab hukum dari masing-masing pihak terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban. Namun didalam perjanjian kerja ini penulis hanya

menemukan ketentuan saksi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ke II (Penerima Kerja) saja, sedangkan penulis tidak menemukan ketentuan sanksi apabila pihak I (Pemberi Kerja) melanggar ketentuan dalam isi perjanjian kerja tersebut.

### **3.3 Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Perusahaan dan Karyawan di UD. Surya Abadi Furniture**

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Karena di era globalisasi saat ini, industrialisasi dan hukum yang berbasis nilai-nilai keislaman, lebih diperhatikan agar posisi antara Perusahaan dan tenaga kerja dalam keadaan seimbang sehingga aspek keadilan dapat tercapai. Hukum seyogyanya memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Pelaksanakan Al-Adalah (Keadilan) dalam suatu perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajiban .

Secara garis besar Perjanjian Kerja antara UD. Surya Abadi Furniture dengan Karyawan sudah dibuat dengan baik, namun terdapat kekurangan terhadap pencantuman klausul yang mengatur mengenai ketentuan pemberian sanksi hukum apabila Pihak I (Pemberi Kerja) tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian kerja. Dalam Perjanjian Kerja tersebut hanya mencantumkan pemberian sanksi kepada pihak ke II (Penerima Kerja ) saja, apabila melanggar ketentuan pada Pasal 2 No 2s/d 12 dalam perjanjian kerja. Hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban Pengusaha dan Karyawan, sehingga belum mencapai suatu penerapan asas keseimbangan yang menjadi tujuan utama. Dan ditinjau dari Perspektif Islam Posisi antara Pengusaha dan Karyawan pelaksanaan hak dan kewajiban telah adil dan seimbang. Dengan demikian bahwa bentuk ideal dari sebuah perjanjian kerja adalah adanya kepastian dalam menempatkan posisi ,masing-masing pihak untuk menempatkan dirinya dalam suatu perjanjian dalam perjanjian kerja di UD. Surya Abadi Furniture telah tercapai.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 4.1.1 Bahwa bentuk dan isi Perjanjian kerja yang dibuat oleh Pengusaha dan karyawan di UD. Surya Abadi Furniture telah dibuat secara tertulis dan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1). Isi dari Perjanjian Kerja Di UD. Surya Abadi Furniture telah memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan hubungan kerja. Serta perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak telah sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf d yaitu pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. perjanjian kerja di UD. Surya Abadi Furniture telah sesuai dengan pengertian perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Serta Perjanjian Kerja di UD. Surya Abadi Furniture telah memuat empat syarat perjanjian kerja yaitu: (1) Kesepakatan kedua belah pihak; (2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; (3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan (4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan, ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.1.2 Bahwa tanggungjawab hukum para pihak dalam perjanjian kerja di UD.Surya Abadi Furniture adalah para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja. Sehingga berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, Pemberi Kerja dan Penerima Kerja telah melaksanakan hak dan kewajibannya oleh karena itu, dapat dikatakan telah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 54 ayat (1) huruf f.
- 4.1.3 Bahwa penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja antara Perusahaan UD. Surya Abadi Furniture dengan penerima kerja masih kurang berimbang, dimana didalam perjanjian belum dicantumkan klausul tentang sanksi hukum apabila Pemberi kerja (pengusaha) melanggar ketentuan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja. Di dalam perjanjian kerja tersebut baru

dicantumkan klausul mengenai sanksi administratif apabila Penerima Kerja apabila melakukan pelanggaran. Hal tersebut menyebabkan ketidakadilan bagi Penerima Kerja. Sehingga Asas keseimbangan dalam perspektif Islam dimana tujuan dari asas tersebut adalah keadilan antara Pengusaha dan Karyawan belum tercapai.

## **4.2 Saran**

- 4.2.1 Kepada Pihak Pemberi Kerja atau Pihak UD. Surya Abadi Furniture sebaiknya untuk lebih mempelajari lagi mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan hukum ketenagakerjaan. Sehingga dalam membuat perjanjian kerja dapat lebih memahami klausul-klausul apa saja yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kerja yang akan disepakati dengan Penerima Kerja. Penulis menemui kekurangan mengenai tidak adanya klausul tentang ketentuan pemberian sanksi apabila Pengusaha melanggar hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja. untuk itu alangkah baiknya apabila dalam perjanjian kerja di UD. Surya Abadi Furniture dicantumkan mengenai klausul tentang Pemberian Sanksi Administratif atau pidana apabila pihak Pengusaha melanggar ketentuan yang disepakati dalam perjanjian kerja, agar asas keseimbangan dalam perspektif islam mengenai keadilan antara Pengusaha dan karyawan dapat tercapai.
- 4.2.2 Kepada Penerima Kerja atau Karyawan di UD. Surya Abadi Furniture, juga dianjurkan untuk lebih cermat lagi ketika akan menyepakati dan menandatangani perjanjian, supaya apabila terdapat kekurangan dalam klausul perjanjian dapat ditanyakan kepada pihak pengusaha, jadi tidak asal menyetujui saja. Pihak Penerima Kerja harus lebih memahami lagi mengenai pengaturan-pengaturan yang mengatur hak dan kewajiban yang dibebankan kepada Pengusaha dan Karyawan, agar pihak Penerima Kerja tahu apakah hak dan kewajiban para pihak sudah dicantumkan secara seimbang dan adil atau belum dalam perjanjian kerja.
- 4.2.3 Kepada Pemerintah, sudilah kiranya untuk menetapkan kebijakan mengenai segala hal tentang hubungan industrial yang adil sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada Tenaga Kerja. Serta kepada pemerintah untuk

melaksanakan pengawasan terhadap setiap perusahaan agar dalam membuat perjanjian kerja tidak berat sebelah atau tidak lebih menguntungkan pihak pengusaha saja, sehingga apabila pengawasan ini dilakukan dapat memberikan kepastian hukum yang jelas bagi Tenaga Kerja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Mohammad Daud, 2000, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ali, Zaenuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Asyhadie, Zaeni, 2018, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Kerja*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUH perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bambang, R. Joni, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Budiono, Herlien. 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Daeng Naja, H.R, 2009, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pusaka
- Djumialdji, 2006, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fuady, Munir , 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Gemala Dewi, 2005, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana

- Husni, Lalu, 2000, *Pengantar Hukum Keenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Manulang, Sendjun H., 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Miru, Ahmad, 2013, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad, Abdulkadir, 1991, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muljadi, Kartini, Widjaja, Gunawan, 2010, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Prodjodikoro, Wirjono, 2004, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VII, Bandung: Sumur Bandung
- Rusli, Hardijan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Saliman, R. Abdul, Hermnsyah, Jalis, Ahmad, 2008, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Renada Media Group
- Salim H.S, 2003, *Hukum kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti, 1997, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditia Bakti
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa
- Sukandar, Dadang, 2011, *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta: CV Andi Offset
- Sunyoto, Danang, 2016, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Yogyakarta: Nuha Medika
- Satrio, J, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: PT.Citra Aditya Bandung

### **Website:**

Muhammad Dwi Kuncoro, 2011, *Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Sahnya Perjanjian Hibah*, <http://eprints.undip.ac.id/52099/1/>. Diunduh Minggu 18 November 2018 pukul 10.45

B Ristiono, 2012, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id>, diunduh Kamis 8 November 2018 pukul 09.30.

MF Setiahardi, 2017, *Kajian Teori Perjanjian Pada Umumnya* dalam <http://repository.unpas.ac.id> diunduh 08 November 2018, pukul 10.00

Maria Amanda, 27 April 2016, *Berakhirnya Hubungan Kerja*, dalam <http://www.hukumtenagakerja.com/perjanjian-kerja/berakhirnya-perjanjian-kerja/>. Diunduh Minggu 07 Oktober 2018 pukul 19:39

Desta Ayu, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan & Hukum Bisnis*, dalam <http://destayu.blogspot.com/2017/01/syarat-jenis-dan-berakhirnya-perjanjian.html> diunduh Minggu 07 Oktober 2018 Pukul 20.00

### **Jurnal:**

Emanuel Raja Damaitu, “*Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Edisi 1 Januari-Juni 2014

### **Daftar Peraturan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan